

## TANTANGAN CHINA SEBAGAI NEGARA ADIDAYA BARU

7

Ziyad Falahi dan Poltak Partogi Nainggolan

### Abstrak

*Kemajuan ekonomi China yang pesat dalam beberapa dasawarsa belakangan telah mendorong ekspansi dirinya sebagai kekuatan militer dan politik baru di tingkat regional dan global. Kampanye Belt and Road Initiative (BRI) dan kemampuan negeri itu dalam mengatasi merebaknya pandemi Covid-19, yang telah membuat AS tidak berdaya, telah memantapkan posisi China sebagai negara adidaya dunia baru. Manuver China di berbagai kawasan, terutama Asia Pasifik, pun kemudian menghadapi respons asertif baik secara politik, ekonomi, maupun militer oleh AS, Jepang, India dan Australia di lapangan dan fora diplomasi multilateral, karena telah mengubah tata dunia yang ada, dengan berbagai implikasi baru yang ditimbulkannya. Tulisan ini menganalisis manuver agresif China sebagai negara adidaya baru dan respons negara besar lainnya di berbagai kawasan yang telah menciptakan eskalasi ketegangan dan Perang Dingin baru dan mengancam kepentingan banyak negara, termasuk Indonesia.*

### Pendahuluan

Reformasi ekonomi China pasca-1978 di bawah Deng Xiaoping telah membawa sukses besar dalam mengubah wajah negara besar yang miskin dan terbelakang menjadi negara *superpower* atau adidaya baru dunia di berbagai sektor. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di atas dua digit selama beberapa dasawarsa dan tetap tumbuh dinamis di atas 7% saat dunia menghadapi kesulitan ekonomi belakangan ini, China telah muncul sebagai negara adidaya baru. Kapasitas ekonomi China yang terus berkembang hingga ke berbagai kawasan dan menjangkau

negara-negara pinggiran, sehingga mendorong peningkatan kekuatan militer dan politiknya di tingkat global.

Kapasitas baru China yang tercipta di bawah kepemimpinan Xi Jinping telah memunculkan negeri ini sebagai sulit tertandingi dan memiliki kekuatan tawar yang luar biasa, sehingga menimbulkan kegentaran, baik di negara besar tetangganya maupun AS sebagai negara adidaya tunggal pemenang Perang Dingin sebelumnya. Kemampuan Presiden Xi dalam mengatasi pandemi Covid-19 mendukung prestasi-prestasi baru China untuk



memimpin dunia, mengambil alihnya dari kepemimpinan AS yang semakin surut di berbagai kawasan. Kemampuan China dalam mengontrol merebaknya kontaminasi pandemi telah memungkinkan Xi dapat segera membuka kembali pabrik-pabrik di negerinya pada akhir Maret 2020 untuk segera memulihkan perekonomiannya.

Belakangan diketahui, pertumbuhan ekonomi China yang tidak tersaingi oleh rival utamanya, AS, telah mendorong berkembangnya nafsu imperialisme ke berbagai negara dan kawasan. Ini merupakan konsekuensi logis dari pesatnya sukses pembangunan kapitalis negeri itu sejak modernisasi dicanangkan Deng Xiaoping. Ekspansi ekonomi China kemudian memotivasi pengembangan kekuatan angkatan bersenjata negeri itu, tidak hanya untuk memenuhi kepentingan melindungi pertahanan dan keamanan domestik, tetapi juga kepentingan nasionalnya yang lalu tumbuh secara cepat dan mengikutinya di mancanegara. Tidaklah kemudian mengherankan, militer mengembangkan sayapnya, menjangkau lintas-kawasan dan ujung dunia, dengan didukung pengembangan kapal-kapal selam dan kapal induk canggih bertenaga nuklir menandingi kekuatan militer para rivalnya, terutama AS.

Munculnya China sebagai negara adidaya ekonomi baru, yang dengan kapasitasnya yang tinggi mampu menawarkan bantuan dengan segala konsesi ke banyak negara di berbagai kawasan, terutama di masa krisis, telah membantu negara ini secara cepat menggeser peran AS selama beberapa dasawarsa. Manuver-manuver kapal-kapal angkatan laut China di Samudera

Pasifik dan Samudera Hindia yang semakin agresif mengimbangi agresifitas kekuatan modal dan investasinya yang telah berkembang pesat dan tidak terbendung. Pengembangan kekuatan China di kawasan lainnya, termasuk Afrika yang termarginalisasi selama ini dan langka dari jangkauan investasi AS, tinggal menunggu waktu pengembangannya saja. Namun, tentu saja, AS sebagai negara adidaya dunia yang tersingkirkan, dan negara-negara besar (*big powers*) lainnya di kawasan, seperti Jepang dan India tidak akan tinggal diam, mengingat mereka menghadapi ancaman kepentingan serupa, di berbagai mandala, baik secara ekonomi, politik maupun militer, atau dari aspek pertahanan keamanan.

Tulisan ini menganalisis tantangan yang muncul dan dihadapi China seiring dengan klaim keadidayaan negara itu, yang dapat mengganggu kelangsungan kepentingan hegemoni dan nafsu imperialismenya dewasa ini. Kajian dan analisis dilihat dalam tiga perspektif, yakni ekonomi, militer dan politik, dengan menggunakan studi kepustakaan dan analisis kualitatif

### **Tantangan Ekonomi**

Munculnya China, sebagai pesaing keadidayaan ekonomi AS dan memperoleh tantangan langsung dari AS, mengemuka sejak tahun 2008, ketika Presiden AS Barack Obama di forum G-20 menegaskan bahwa China telah menyebabkan gangguan atas keseimbangan global. Pendapat Obama itu disampaikan untuk merespons insiatif ambisius China untuk bergabung ke dalam poros kekuatan ekonomi Brazil, Rusia, India, dan China (BRICs) pasca dibentuk tahun 2009. China, dengan kecerdikannya, untuk membuat

poros ini menjadi lebih kuat dalam mendominasi perekonomian dunia, mengajak Afrika Selatan, yang kaya dengan potensi sumber daya alam emasnya, untuk bergabung, sehingga dapat mengancam kedigdayaan AS. Dengan kata lain, China ingin memperkuat posisinya sebagai adidaya ekonomi global, sambil memperkuat likuiditasnya, dengan mengandalkan cadangan emas global, yang akhirnya terbaca AS, yang dengan segera melancarkan respons penjejalan.

China menyadari bahwa perkembangan negaranya tidak bisa dilepaskan dari kesuksesannya mempertahankan sistem politiknya yang tetap tertutup terhadap demokrasi. Sukses China di awal abad ke-21 sendiri sesungguhnya telah menunjukkan kemajuan signifikan, dengan capaian pertumbuhan ekonomi yang mencapai dua digit. Pemerintah baru pasca-Deng dengan konsisten menerapkan pemikiran pragmatisme, "tidak peduli kucing itu hitam atau putih sejauh ia bisa menangkap tikus." Praktik ini telah membuka China dalam suksesnya mendapatkan banyak investasi dari dan kerja sama secara luas dengan banyak negara, karena didukung oleh sistem pemerintahan monolitik yang stabil. Sistem politik otoriter yang stabil secara realistis telah menolong China dalam memperoleh kepercayaan para investor asing, yang selalu bersikap pragmatis.

Tantangan China di tingkat regional dan global melalui blok ekonomi datang dari AS. Rival, yang adalah seteru lama China di era Perang Dingin itu, berusaha menghambat dan mengepung ekspansi ekonomi China dengan meluncurkan inisiatif baru kerja sama Kemitraan Trans-Atlantik (*Trans-Atlantic Partnership*), yang akan ditopang AS, Eropa dan negara-negara lain di kawasan yang berbeda, yang

diperjuangkan sejak tahun 2010. AS menilai penting gagasan Kemitraan Trans-Atlantik untuk menghadang pengembangan gagasan kerja sama Jalur Sutera Baru (*New Silk Road*), yang dikampanyekan rezim Xi Jinping lebih dini, dengan melibatkan kekuatan ekonomi global lainnya, yaitu Rusia, yang dulunya menjadi tulang punggung negara adidaya Uni Soviet, sekutu China, dan sebaliknya, seteru AS, di era Perang Dingin.

Trans-Atlantik lumpuh di tengah jalan, tetapi perlawanan AS dan sekutunya terhadap China tidak bisa diabaikan dalam blok kerja sama regional baru, RCEP (*Regional Comprehensive Economic Partnership*), yang didorong ASEAN, dengan China juga terlibat sebagai negara anggota bersama para mitra kerja ASEAN lainnya, yakni Australia, China, New Zealand, Jepang, Korea Selatan dan India, sejak tahun 2012. Jika berkembang baik, tanpa rivalitas dan permasalahan baru di dalamnya, RCEP diantisipasi dapat melebihi BRICs, yang China telah masuk sebagai motor penggerak demi mendominasi ekonomi Pasifik.

Dengan tingginya tingkat interdependensi negara anggotanya, RCEP diperkirakan dapat mengumpulkan sepertiga GDP dunia. Tetapi, sejak akhir tahun 2019, akibat lalu juga terancam oleh perkembangan kinerja dan ekspansi ekonomi China, negara besar anggotanya, India mulai mempertimbangkan kembali posisinya. Sebagai konsekuensinya, RCEP menjadi tidak prospektif dalam menyediakan jalan keluar alternatif bagi dominasi ekonomi China diluar BRICs. Gouguang Wu (2011) menyatakan bahwa China tengah mengalami *paradoxal option*, yang di satu sisi mengelola dengan capaian

kemajuan perekonomiannya, namun di sisi lain, menghadapi tantangan target pertumbuhan di masa depan.

Memang China selama hampir dua dekade merupakan negara dengan GDP (*Growth Domestic Product*) terbesar di dunia, dengan arus kapital dan investasi yang tinggi. Tidak heran, investasinya menjangkau pembangunan infrastruktur negara-negara miskin di Asia Selatan, seperti Sri Lanka, serta Timor Leste dan Fiji di Asia Pasifik, dan bahkan benua Afrika. Sehingga, tantangan muncul dari negara-negara besar seperti India, Jepang dan Australia.

### Tantangan Militer

Munculnya China sebagai negara adidaya ekonomi secara simultan telah didukung oleh pembangunan kekuatan militernya, dengan pembangunan pangkalan di halaman belakangnya, yaitu Laut China Selatan, dan di kawasan lain, seperti di negara Sri Lanka, Timor Leste, dan Fiji. Angkatan Laut (AL) China, kini didukung oleh keberadaan dua kapal induk modern bertenaga nuklir, Liaoning dan Shandong, yang membawa pesawat-pesawat jet tempur J-15. AL China kian ditakuti dengan operasi kapal-kapal perangnya yang telah ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya, untuk bisa beroperasi di wilayah yang jauh dari negaranya.

Tanpa diantisipasi sebelumnya, didorong oleh tekanan sikap agresif dan kebutuhan ekspansi yang tinggi, China telah melakukan pembangunan pangkalan militer di Laut China Selatan secara besar-besaran dan sangat serius, setelah melakukan program reklamasi yang intensif. Langkah ini diteruskan dengan pembangunan pangkalan dan

instalasi militer di Asia Selatan, yakni di Sri Lanka, dan di Pasifik Selatan, yakni di Fiji. Sementara, di Timor Leste, kapal-kapal perangnya telah memanfaatkan pelabuhan laut negara itu setelah menopang pembangunan infrastruktur modernnya. Perkembangan ini kemudian direspons secara serius oleh kekuatan AL Australia dengan membangun infrastruktur militernya di Papua Niugini, di samping juga oleh Selandia Baru, belakangan, yang selama ini menjadikan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan sebagai mitra utamanya. Australia telah membangun payung nuklirnya dengan AS demi melindungi diri dari jangkauan nuklir ICBM China (Nainggolan, 2018: 72-80).

Secara simultan, pengembangan kekuatan militer, terutama kekuatan laut China, memperoleh tantangan dari AS dan negara besar lainnya, seperti Jepang, India, dan Australia. Di kawasan Laut China Timur, dan juga sekarang ini di Laut China Selatan, manuver AL China telah dibayangkan oleh AL Jepang dengan gelar kapal induk dan kapal-kapal perang beserta pesawat-pesawat tempur. Di Samudera Hindia, AL India sering menggelar operasi untuk membayangkan manuver AL China. Di Laut China Selatan, untuk merespons gelar AL China, AS menjadi lebih sering mengirim tiga kapal induknya, yakni USS Nimitz, USS Ronald Reagan dan USS Theodore Roosevelt. Para sekutu AS berharap pada pengadaan pesawat tempur terbaru F-35A dan F-35B asal AS, untuk bisa merespons ancaman China secara efektif (Nainggolan, 2018: 48, 52-53, 61, 69). Sedangkan pembangunan pangkalan dan instalasi militer China di benua Afrika, yakni Jibouti, telah memicu respons AS, dengan pembangunan kekuatan militer Africom-nya.

## Tantangan Politik

Tantangan politik dihadapi China dalam perseteruannya yang semakin sengit dalam ekonomi dengan AS, yang telah menciptakan perang dagang, sehingga diikuti dengan rivalitas kekuatan militer, yang mewarnai fora politik internasional. Contoh yang jelas adalah dalam masalah Palestina, yang mempengaruhi sikap kedua negara di PBB dan di mandala konflik Timur Tengah. Presiden Trump mendukung secara definitif keinginan unilateral pemerintahan Zionist PM Netanyahu untuk melakukan aneksasi wilayah Tepi Barat, yang meliputi Lembah Jordan, dan Jalur Gaza. Sementara, Presiden Xi Jinping menolak secara tegas rencana aneksasi wilayah-wilayah Palestina, yang tidak sejalan dengan solusi berimbang PBB yang telah dituangkan dalam banyak resolusi, khususnya terkait status Kota Jerusalem.

Dalam perkembangan terkini, kompetisi China dan AS yang meluas merambah politik luar negeri dan dunia diplomasi. Sikap Trump yang kian tidak terkendali telah memicu keputusannya untuk menutup kantor Konsul Jenderal China di Houston, AS. Hal ini menimbulkan reaksi keras China, yang melakukan tindakan yang setara di bidang politik luar negeri. Beijing pun mengeluarkan perintah penutupan Konsulat AS di Chengdu, Sichuan, paling lambat 27 Juli 2020.

Selama ini, di berbagai forum internasional yang membahas Laut China Selatan, AS terus mengecam tindakan unilateral China yang berusaha mendikte negara di luar kawasan Asia Pasifik. China memaksa negara-negara lain untuk mematuhi kebijakan dan protokol

keamanan dan navigasi di wilayah perairan itu yang diintroduksinya. Sedangkan AS, pengguna terbesar dan pengontrol stabilitas keamanan di perairan internasional itu selama ini terlecehkan dan menolak untuk mematuhinya. Perang kata-kata pun bermunculan di berbagai fora dan media internasional untuk memperkuat posisi dan sikap masing-masing. Australia, Jepang dan India mendukung sikap dan respons politik AS di fora internasional, dengan mendorong solusi multilateralisme.

## Penutup

Perkembangan memperlihatkan munculnya China sebagai negara adidaya baru dengan berbagai tantangan yang dihadapinya secara logis dari negara adidaya dan *big powers* di berbagai kawasan, di bidang ekonomi, militer dan politik. Situasi dunia dewasa ini, yang ditandai dengan munculnya negara adidaya baru, China, dalam kenyataannya secara otomatis tidak menjamin terciptanya kondisi dunia yang ditandai dengan stabilitas keamanan. Karena, rivalitas baru antara dua kekuatan adidaya, yakni China dan AS, muncul di ketiga bidang tersebut, yang merambah ke berbagai kawasan dan negara. Dunia tentu saja jika ingin dapat mencegah pecahnya konflik terbuka baru membutuhkan respons penguatan peran PBB, dengan solusi multilateralisme yang berimbang.

## Referensi

Benarrou, Julia, Paul Handley & Leo Ramirez. 2020. "US-China Diplomatic Ties Fray: World Powers Tussling Over an Increasing Number of Issues." *The Jakarta Post*, 26 Juli 2020, hal. 8.

- Felix, Mark. 2020. "Tensions Soar as US Orders China Consulate Shut," *The Jakarta Post*, 24 Juli 2020, hal. 8.
- "Krisis China-AS Terus Memburuk," *Kompas*, 27 Juli 2020, hal. 1-15.
- Nainggolan, Poltak Partogi. 2018. *Indonesia dan Rivalitas China, Jepang dan India*. Jakarta: Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- "Persaingan AS-China: Asia Tenggara Paling Terdampak," *Kompas*, 24 Juli 2020, hal. 4.
- Subramanian, Arvind. 2011. "The Inevitable Superpower: Why China Dominance is a Sure Thing", *Foreign Affairs*, Vol 90 (5). Oktober 2011, hal. 67-90.
- "Tiongkok Tutup Konsulat Amerika di Chengdu," *Media Indonesia*, 25 Juli 2020, hal. 14.
- Wu, Gouguang. 2011. "China: Dilemma of Scientific Development", *Asian Survey*, Vol 51. No 1, Januari-Februari 2011, hal. 78-103.



Ziyad Falahi  
ziyad.falahi@dpr.go.id



Poltak Partogi Nainggolan  
partogi.nainggolan@dpr.go.id

Ziyad Falahi, M.Si., menyelesaikan pendidikan S-1 Hubungan Internasional Universitas Airlangga pada tahun 2010. Lulus S-2 Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia pada 2012. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Pertama bidang Hubungan Internasional pada Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI.

Prof. Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A., menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Politik dan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Indonesia pada tahun 1986, pendidikan S2 Ilmu Politik dan Hubungan Internasional the University of Birmingham (UK) pada tahun 1999, dan pendidikan S3 Ilmu Politik dan Hubungan Internasional Albert Ludwigs Universitaet Freiburg (Deutschland) pada 2011 dengan *judicium magna cumlaude*. Beliau adalah seorang Profesor Riset bidang Hubungan Internasional pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Indonesia dan Rivalitas China, Jepang, dan India" (2018) dan "*Proxy War* di Timur Tengah (2020)".

### Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.